

## **KETIMPANGAN GENDER DAN PENDIDIKAN (SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS)**

Dra. Hj. Eny Suhaeni, M.Si\*.

### Abstrak

Pendidikan menjadi satu kebutuhan bagi setiap individu, kebutuhan tersebut tidak dibedakan dari persepsi apapun melainkan bersifat holistik. Namun pada realitasnya, di tengah kehidupan masyarakat terjadi pembelahan dengan pembedaan dan distribusi kebutuhan pendidikan tersebut. Sebut saja jenis kelamin masih menjadi “alat” yang dianggap ampuh melakukan marginalisasi kaum perempuan dalam mengakses pendidikan. Adanya perbedaan gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan, yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan. Gerakan sosial ini disebut sebagai gerakan Feminisme. Sebagai akibat ketidaksamaan kesempatan demikian maka dalam banyak masyarakat dapat dijumpai ketimpangan dalam angka partisipasi dalam pendidikan formal.

*Keyword: Gender, Ketimpangan, Pendidikan, dan Tinjauan Sosiologis”*

### **A. Pendahuluan**

Gender secara leksikon merupakan identitas atau penggolongan gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya. Penggolongan ini secara garis besar berhubungan dengan dua jenis kelamin, masing-masing sering dirumuskan dengan kategori feminin dan maskulin.

Secara terminologi, gender dapat di gunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual. Perbedaan yang dimaksud menurut Budiman (1985:4) , usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan, dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial yang berbeda merupakan

---

\* Dosen Tetap Yayasan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

suatu tindakan yang direncanakan. Jadi apa yang disebut dengan kodrat adalah buatan , yaitu hasil kombinasi antara tekanan dan paksaan di suatu pihak dengan rangsangan yang tidak wajar, sekaligus menyesatkan pihak lain, khususnya perempuan.<sup>1</sup>

Menurut Oakley (1972), dalam **Sex, Gender dan Society** , Gender adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan sebagaimana selama ini masyarakat memandangnya. Namun gender bersifat sosiologis yang *socially constructed* dan gender merupakan *Behavioral Differences* antara laki-laki dan perempuan. Dan yang disebut sebagai kodrat adalah jenis kelamin atau disebut sex yang merupakan kodrat Tuhan dan bersifat permanen (biologis). Bahkan menurut Caplan (1987), dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosial dan cultural. Gender berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis tidak bisa berubah dan bersifat permanen(tetap)<sup>2</sup>

Dengan munculnya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara panjang dan berakar oleh masyarakat sangat mempengaruhi semua sektor kehidupan , baik sosial, ekonomi, politik, agama dan pendidikan yang mengakibatkan munculnya perilaku diskriminatif, ketidaksetaraan, perbedaan strata/kelas sosial antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan atau diskriminasi tersebut seringkali cenderung menimpa sebagian besar jenis kelamin perempuan. Macionis (1996;245-246), mendefinisikan bahwa

stratifikasi gender (*Gender Stratification*) sebagai “*The unequal distribution of wealth, power, and privilege between the two sexes*”. Sebagai ketimpangan dalam pembagian kekayaan, kekuasaan dan privilese antara laki-laki dan perempuan. Dan ketimpangan ini (ketidaksetaraan) ini, menurut Macionis terjadi di berbagai bidang; di dunia kerja, dalam pelaksanaan rumah tangga, di bidang pendidikan, dan di bidang politik. Selain itu jenis kelamin perempuan pun lebih cenderung menjadi korban kekerasan dari jenis kelamin laki-laki daripada sebaliknya.<sup>3</sup>

Adanya perbedaan gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan, yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan. Gerakan sosial ini di sebut sebagai gerakan Feminisme, yang menurut Giddens (1989;181) telah bermula di Perancis pada abad ke 18 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Di bidang politik, gerakan ini terpusat pada perjuangan persamaan hak pilih dengan laki-laki dan telah menghasilkan diberikannya persamaan hak pilih di banyak negara.

Berbagai masyarakat maupun dalam kalangan tertentu dalam masyarakat masih sering kita jumpai nilai dan aturan agama atau adat kebiasaan yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal. Ada suatu nilai yang mengemuka bahwa “perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga” ada yang mengatakan pula bahwa perempuan harus menempuh pendidikan yang oleh orang tuanya dianggap ‘sesuai dengan kodrat perempuan’ dan ada yang berpandangan bahwa ‘seorang gadis sebaiknya menikah pada usia muda agar tidak menjadi

“perawan tua” . Atas dasar nilai dan aturan demikian, ada masyarakat yang mengizinkan perempuan bersekolah tetapi hanya sampai jenjang pendidikan tertentu saja atau dalam jenis atau jalur tertentu saja, pun ada masyarakat yang sama sekali tidak membenarkan anak gadisnya untuk bersekolah.

Sebagai akibat ketidaksamaan kesempatan demikian maka dalam banyak masyarakat dapat dijumpai ketimpangan dalam angka partisipasi dalam pendidikan formal. Prestasi akademik ataupun motivasi belajar sering bukan merupakan penghambat partisipasi kaum perempuan, karena siswi berprestasi pun sering tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun seiring ekspansi pendidikan dan pola-pola kehidupan yang sudah modern , maka angka partisipasi perempuan dalam segala jenjang dan angka partisipasi dalam berbagai bidang lainnya maju dengan pesat pula. Meskipun demikian hingga kini masih banyak kesenjangan kesempatan pendidikan dan bidang-bidang lainnya antara laki-laki dan perempuan yang menandai masih adanya kesenjangan yang menandainya. Kesetaraan pendidikan, persamaan hak sektor lainnya masih merupakan suatu harapan yang masih jauh dari kenyataan di lapangan.

## **B. Isu Gender Di Era Global**

Berbagai macam isu gender yang mengemuka belakangan sangat mempengaruhi pola-pola perubahan pada masyarakat; masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat dan negara,

perdagangan perempuan (*trafficking*) dan pelacuran paksa dan lain-lain. Hal ini merupakan dampak yang di picu oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak urbanisasi, tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan semakin bertambah dan rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut Mansour Fakih, berbagai ketidakadilan, marginalisasi, (pemiskinan perempuan), subordinasi, stereotipe, beban ganda, kekerasan, eksploitasi, perdagangan ilegal muncul akibat adanya perbedaan gender (*gender inequalities*), terutama bagi kaum perempuan. Hal ini menurut Mansour Fakih termanifestasikan dalam berbagai sektor diantaranya:

1. *Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi*

Gelombang perdagangan bebas dikendalikan oleh pemilik modal yang notabenehnya kaum laki-laki. Kaum perempuan ditindas, dieksploitasi sebagai tenaga buruh murah, diperjual belikan sebagai bahan komoditi (*Trafficking*). Dan yang berkuasa (dominan) untuk melakukan proses penindasan tersebut adalah para elit, baik di bidang ekonomi, sosial bahkan elite agama yang turut menjadi bagian dari proses de-humanisasi . melakukan pembiaran terhadap berlangsungnya penindasan terhadap kalangan masyarakat lemah dan dilemahkan.

2. *Adanya subordinasi atau anggapan tidak penting terhadap keputusan politik*

Perampasan daya sosial yang mencakup perampasan terhadap akses informasi, pengetahuan, pengembangan keterampilan dan potensi kolektif, serta partisipasi dalam organisasi dan sumber-sumber keuangan.

Perampasan daya politik meliputi perampasan akses individu pada pengambilan keputusan politik, termasuk kemampuan memilih dan menyuarakan aspirasi serta bertindak kolektif . Tekanan ini ini lebih merupakan akibat dari operasi otoritarian rezim dan pendukung koersifnya. Keterdamaian ini yang harus dibongkar. Perampasan daya psikologis mencakup tekanan eksternal yang menyebabkan hilangnya perasaan individual mengenai potensi dirinya dalam kancah sosial politik, sehingga individu tidak memiliki peluang untuk berfikir kritis. Tekanan eksterna itu dinternalisasi terhadap si miskin menjadi sebuah kesadaran palsu, mereka percaya bahwa mereka bodoh, miskin tidak mampu melakukan apapun selain harus mengandalkan orang lain untuk mengubah keadaan dirinya.

### 3. *Pembentukan stereotype dan pelabelan negatif*

Stereotype yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris di lapangan, pelabelan negatif secara umum melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yaitu bahwa perempuan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya hanyalah yang terkait dengan urusan kerumah tanggaa saja (domestik). Konstruksi gender oleh masyarakat selama ini yang bersifat stereotype adalah bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, gemulai, emosional, keibuan dan tekun (feminin), sehingga tempatnya lebih pantas di ruang kerumahtanggaan. Sedangkan laki-laki yang memiliki sifat kuat, kekar,

rasional, jantan dan perkasa (maskulin) sehingga tempat yang lebih pantas bagi laki-laki adalah di dunia terbuka dan menantang (publik). Jika konsep stereotype ini dipertukarkan sesuai kondisi waktu dan tempat, maka perubahan akan terjadi tidak saja hanya di ruang rumah tangga, namun juga terjadi di tempat kerja, ruang pendidikan, ruang politik, ruang ekonomi, ruang agama bahkan pada tingkat negara dan bangsa. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki ruang yang sama untuk melakukan fungsi-fungsinya sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Tuhan untuk hidup berdampingan dan bekerjasama.

4. *Kekerasan (violence)*

Kekerasan yang dimaksud seringkali dialami oleh kalangan perempuan tidak saja bersifat fisik, namun juga non fisik, seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, pelecehan seksual, caci maki (*sarkastic*). Para pelaku kekerasan tidak hanya bersifat individu baik dalam rumah tangga sendiri (suami, anak, paman, mertua) namun ada juga mereka dari kelompok masyarakat misalnya, tetangga atau majikan.

5. *Beban kerja panjang dan lebih banyak (burden)*

Bentuk lain dari ketidakadilan atau diskriminasi gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam satu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% pekerjaan rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain

bekerja di tempat kerja (publik) , juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestik).

6. *Sosialisasi ideologi nilai peran gender*

Yusuf Supiandi membeberkan dampak ketidaksetaraan gender menurutnya sangat memberi pengaruh yang amat kuat terhadap kemiskinan. Misalnya, investasi terhadap SDM, khususnya anak-anak dan perempuan dalam pendidikan dan kesehatan. Perempuan yang berpendidikan dan mempunyai kesehatan yang baik akan mempunyai kesempatan untuk aktif bekerja secara produktif pada sektor-sektor formal serta akan menikmati pendapatan yang baik dibanding dengan perempuan yang tidak memiliki pendidikan dan sakit-sakitan. Selai itu, perempuan yang memiliki pendidikan akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anak-anaknya yang merupakan investasi bagi masa depan bangsa.

Hasil studi-studi gender selama ini lebih banyak melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu harus ada upaya-upaya untuk mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan banyak yang belum terfokus pada azas pengajaran persamaan dan kesetaraan, sehingga justru malah melahirkan beban berganda ganda bagi perempuan itu sendiri, wal hasil tidak memberi dampak penguatan terhadap kedudukan perempuan itu sendiri.



### **C. Problematika Gender dan Pendidikan**

Dalam deklarasi hak-hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa :“setiap orang berhak mendapatkan pengajaran...dan pengajaran harus dengan Cuma-Cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima, serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan,serta harus memajukan kegiatan PBB dan memelihara perdamaian duania...”.

Terkait dengan deklarasi tersebut di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian juga pendidikan memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di dalam masyarakat sosial.

Pernyataan di atas mengemuka, disebabkan telah terjadi banyak ketimpangan gender di berbagai sektor di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Diantara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Dalam implementasi pendidikan masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki brada pda sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Anak laki-laki lebih banyak diberikan bahan ajar tentang hal-hal yang bersifat keluar (publik) seperti perbengkelan,

teknik mesin dsb. Sementara perempuan diberikan pengajaran tentang cara memasak, menjahit dan hal-hal yang bersifat kerumahtanggaan. Dengan demikian kurikulum yang memuat bahan ajar bagi para peserta didik belum memuat secara netral dan masih bersifat membedakan, baik dalam praktek, dalam gambar atau ilustrasi kalimat dalam penjelasan materi sebagainya .

Seharusnya yang lebih penting dilakukan dalam proses pendidikan adalah nilai-nilai kesetaraan dan persamaan yang harus disosialisasikan melalui media pembelajaran, metode pembelajaran alat atau buku ajar sebagai pegangan para guru dan siswa yang harus dipraktikkan secara langsung dan dibiasakan sebagai sebuah nilai baru yang berbasis kesetaraan dalam berbagai bidang ajar.

#### **D. Beberapa Paradigma Pendidikan**

Minimal ada 3 (tiga) paradigma yang selama ini biasa mewarnai sistem dan gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan.

##### *1. Paradigma Konservatif*

Bagi mereka yang menganut paradigma konservatif menganggap bahwa ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu bukan sesuatu yang diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara, adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian dan kemalasan mereka untuk belajar dan

bekerja keras. Jika mereka mau, keadaan aka dapat berbalik kepada mereka, hanya saja bagi mereka bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik bisa dihindari.

## 2. *Paradigma Liberal*

Aliran ini menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau laboratorium komputer dsb. Yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Padahal pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai di masyarakat dan menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan, dan nilai-nilai dasar, agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, dimana pendidikan tidak berupaya mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan menganggap sistem dan struktur yang ada sudah baik atau *given* dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan lagi. (Fakih: 2001)

## 3. *Paradigma Kritis*

Para penganut paradigma ini memandang bahwa pendidikan merupakan arena perjuangan politik. Pendidikan dalam persepektif paradigma ini

mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi dimana mereka berada. Bagi penganut paham ini, adanya kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat merupakan cerminan dalam pola-pola hasil pendidikan. Menurut paham ini, pendidikan mestinya harus secara kuat merefleksikan secara kritis isu-isu ideologi yang melahirkan dominasi (*the dominant ideology*) . Pendidikan harus diarahkan pada konteks transformasi sosial. Tugas utama para pendidika adalah menciptakan ruang-ruang terbuka agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan semakin kuat. Dan mereka (para pendidik) harus melakukan dekonstruksi dan advokasi yang mengarah pada sistem sosial yang lebih adil dan setara. Model paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih peserta didik untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang menjerumitkan dalam sistem dan struktur yang ada dihadapannya. Kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya.<sup>4</sup>

Paulo Freire mengemukakan pendidikan yang selama ini dipraktikkan sebagai sumber kebajikan dianggap telah menjadi sistem penindas yang ulung. Pendidikan yang mestinya memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdalkan peserta didik dan telah berhasil mempolakan mereka menjadi manusia yang justru kehilangan humanisme mereka. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas membuka pemikiran baru dan memfungsikan nur'ani dari kesadaran palsu malah justru berhasil menciptakan

kesadaran palsu dan menjadi pengeang kebebasan berfikir dengan cara-cara yang terselubung, menurut Freire :

“Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan tak akan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyugahi kaum tertindasitu, model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas (egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, yakni paternalisme), yang membuat kaum tertindas jadi objek – objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu sebagai alat dehumanisasi manusia.<sup>5</sup>

Jika kita setuju dengan pernyataan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata peserta didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau tanpa disadari kita telah terjebak ke dalam persekongkolan para penindas dan menjadi ujung tombak untuk menina bobokan peserta didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

#### **E. Membangun Pendidikan Beperspektif Gender**

Jika sektor pendidikan memilih jalan untuk tidak sekedar menjadi pengawal atau penyangga nilai-nilai, tnamun juga harus menjadi pendorong pikiran-pikiran produktif sambil berkolaborasi dengan kebutuhan zaman, maka menjadi salah satu tugas penting sektor pendidikan untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan

mengajak masyarakat pendidikan dan masyarakat di luar itu untuk bersama sama membongkar kepalsuan –kepalsuan tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktek-praktek yang lebih manusiawi yang berpihak pada keadilan dan kesamaan, terutama keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan.

a. *Analiss Gender di lembaga pendidikan*

Hal paling penting untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan adalah tidak sekedar mendasarkan diri pada asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Perubahan cara pandang yang berbasis kesetaraan harus dilakukan dengan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data pendukung yang valid, mencari fakta-fakta empiris di lapangan sambil kemudian melakukan analisis kritis terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat kita. Data – data inilah yang kemudian akan dijadikan patokan untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan dan analisi kritis itu hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya tergenderkan dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga , seperti misalnya; ideologi-ideologi dan tujuan-tujuan yang dikembangkannya, struktur-struktur yang dibangun, gaya manajemennya, pembagian tugas atau pekerjaan, hubungan kekuasaan, tata ruang , ungkapan-ungkapan dan lambang-lambang yang digunakan yang semua itu dapat memberi sinyal sejauh mana lembaga pendidikan tersebut tergenderkan.<sup>6</sup>

b. *Pendidik sebagai Pilar*

Dosen, Guru, ustadz atau kyai dan ustadzah mesti menjadi pilar utama dalam melakukan perubahan terhadap pola-pola diskriminasi yang terjadi di masyarakat selama ini . Pilar-pilar ini sebagai gender *mainstream* yang bertugas maha penting di dalam merekonstruksi pemahaman bias gender dan bahkan ketimpangan gender di lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Sebab gender merupakan pola-pola perilaku yang amat nampak dalam kehidupan sehari-hari yang kemungkinan besar bisa menjadi sebuah ideologi yang bersifat paternalistik. Persoalan gender adalah persoalan budaya, dan pendidikan adalah proses penanaman dan pengakaran budaya. Jika para kyai, guru, ustadz dan ustadzah memiliki wawasan dan pengetahuan tentang kesetaraan gender yang harus dibangun, maka akan mudah mensosialisasikan nilai-nilai tersebut dalam aksi-aksi nyata. Perilaku tidak mendiskriminasi peserta didik yang laki-laki ataupun yang perempuan ke dalam kotak-kotak sesuai jenis kelamin adalah salah satu sikap sensitifitas gender.

c. *Metode dan Materi Pembelajaran*

Pada umumnya, metode pembelajaran dalam sistem belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan masih bersifat klasik, yang membuka ruang-ruang penerimaan secara bulat (*taken for granted*) tak terbantahkan. Yang hanya memberi ruang gerak amat sempit bagi munculnya dialog kritis. Sementara itu, persoalan gender sarat dengan problematika kultural yang sangat sulit diselesaikan tanpa adanya dialog.

## **F. Apa yang Harus Dilakukan?**

Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam dunia pendidikan? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh semua elemen yang ada di hadapan kita . Sektor pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab dan harus menjadi pelaku utama bagi dekonstruksi pemahaman keadilan gender, disamping sektor ekonomi, politik, agama dan lain-lainnya. Untuk mewujudkan asas kesetaraan gender, negara harus menjamin secara kuat melalui undang-undang yang tidak memihak dan menjamin setiap individu memperoleh hak-haknya secara bebas dan merdeka. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga tergantung pada faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan yang sehat dan dinamis.

Isu-isu gender yang muncul di era global sangat terkait dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk hak-hak reproduksi. Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesehatan dan kesejahteraan bersama tanpa harus diskriminatif terhadap kelompok lainnya. Ketimpangan gender yang selama ini terjadi harus dipahami dan diterjemahkan ke dalam aksi-aksi nyata dengan melakukan pembebasan yang bertanggung jawab. Yakni mendorong laki-laki dan perempuan untuk merubah tradisi penzaliman (diskriminasi) ke arah pencerahan dengan berdasarkan pada sikap berfikir positif untuk kemajuan bersama. Tidak



mudah memang, namun harus ada upaya-upaya kuat dari seluruh elemen masyarakat agar sampai pada tujuan kesetaraan dan kesejahteraan bersama.

*Wallahu'alambissawwab.*

## DAFTAR PUSTAKA

Muthali'in, Achmad, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2001

Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarkhi : Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap kaum Perempuan*, Yogyakarta, Bentang Kalyanamitra, 1996

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita d dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985

Gardiner, Mayling Oey, *Feminisme Dunia Pendidikan*, Yayasan Obor, 1997

Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung, Mizan, 1999

Bainar (Ed.), *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Pustaka Cidesindo, jakarta 1998

Freire, Paulo dkk, *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar , 1999

O'Neil, William, *Ideologi-Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

MacDonald, Mandy dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999

Tholkhah, Imam dkk, *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2004.

Jurnal Perempuan, *Persepektif Gender dalam Pendidikan*, No. 23 edisi tahun 2002

Subhan, Zaitun, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam*, Jakarta, El-Kahfi, 2002

---

<sup>1</sup> Ahmad Muthali'in, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001. Hal.21

<sup>2</sup> Dr.H.Zaenuddin Maliki *Bias Gender dalam Pendidikan*,Makalah bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan,2006

<sup>3</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Universitas Indonesia, edisi ke -2 , 2000.

<sup>4</sup> William O'Neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

<sup>5</sup> Paulo Freire dkk, *Menggugat Pendidikan* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999

<sup>6</sup> McDonald, Mandy dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999